

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Selaraskan WTP dan Realita
Entitas / Cakupan	: BPK
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.7
Edisi	: Rabu, 04 April 2018

Selaraskan WTP dan Realita

SINGAPARNA, (PR).-

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berharap dapat mempertabalkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 2018.

Di sisi lain, pengamat menilai, WTP harus selaras dengan realita kemajuan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kepala Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Iwan Saputra mengatakan, raihan opini WTP tersebut bagian dari indikator kinerja pemerintah, dan dapat menentukan apakah tata kelola Pemkab Tasikmalaya baik atau tidak.

"Sejak tiga tahun lalu, alhamdulillah opini WTP kita dapatkan. Ini ikhtiar kita terkait keandalan sistem pengendalian internal, mudah-mudahan tahun ini kita bisa meraih WTP lagi," ucap Iwan sesuai menerima tim audit BPK di Pendopo Lama Kabupaten Tasikmalaya, Jalan Alun-alun Kota Tasikmalaya, Selasa (3/4/2018).

Menurut Iwan, dalam meraih WTP ada beberapa kendala yang mungkin akan dihadapi Pemkab Tasikmalaya. Salah satunya adalah mengukur kinerja pembangunan melalui volume pengerjaan.

Tak hanya itu, laporan pem-

angunan desa yang masuk dalam penilaian WTP juga menjadi salah satu tolok ukur berhasil tidaknya Pemkab Tasikmalaya meraih WTP.

"Kelemahan itu pasti ada, BPK juga pasti akan menyampaikannya. Kami berharap kelemahan yang menyangkut kepatuhan tidak memengaruhi opini WTP. Seluruh laporan kami sampaikan secara umum," ucap Iwan.

Menurut Iwan, kendala lain yang dihadapi Pemkab Tasikmalaya salah satunya pendataan aset yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya. Itu sebabnya, sejak jauh-jauh hari investarisasi aset terutama di beberapa dinas dilakukan agar tidak memengaruhi opini dari BPK.

"Ada kerumitan tersendiri dalam mengelola aset, kami berupaya untuk klasifikasikan," ujar Iwan.

Meskipun meraih opini WTP adalah prioritas, Iwan menyebutkan, bukan berarti Pemkab Tasikmalaya tidak memiliki persoalan dalam sistem pemerintahan.

Meskipun demikian, melalui opini WTP, paling tidak Pemkab Tasikmalaya mampu menunjukkan bahwa sejauh ini pengendalian internal, hingga akuntabilitas pemerintahnya tidak perlu diragukan publik.

Transparan

Sementara itu, akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik dari LAIC Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya Asep M Tamam menilai, opini WTP memang prestasi. Namun, opini WTP belum tentu menjadi tolok ukur dari kemajuan suatu daerah dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Hal itu bisa dilihat dari banyaknya kasus dugaan jual beli opini WTP yang marak diberitakan beberapa waktu lalu. Hal itu menunjukkan, tidak semua opini WTP didapat secara transparan.

"Memang WTP merupakan mimpi para pemimpin daerah, dan kadang dimanfaatkan secara politik untuk membuat citra di mata masyarakat agar bisa dipercaya. Namun, akhir-akhir ini opini WTP tidak selalu identik dengan prestasi, karena lebih dari 50 persen kepala daerah yang mendapatkan opini WTP justru malah ditangkap KPK," ujarnya.

Namun Asep Tamam tetap mengapresiasi Pemkab Tasikmalaya yang dalam tiga tahun terakhir mendapatkan opini WTP. "WTP seharusnya berkaitan erat dengan realita yang ada di wacana publik," katanya. **(Windyati Retno Sumardiyani)*****